

Tinjauan Mata Kuliah

Mata kuliah Legalitas Hukum Kelautan dan Perikanan (MMP15302) berisi penjelasan mengenai perkembangan hukum laut, batas maritim, politik hukum perikanan, usaha kelautan dan perikanan, penegakan hukum di wilayah laut, dan penelitian ilmiah kelautan.

Setelah membaca materi modul ini, diharapkan Anda dapat memahami hukum internasional dan implementasi peraturan perundang-undangan Indonesia dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Pemahaman Anda diharapkan mampu mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Lebih khusus lagi, Anda diharapkan mampu menjelaskan tentang:

1. Sejarah konferensi Hukum Laut Internasional.
2. Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut dan Perkembangannya di Sektor Perikanan.
3. Konsepsi negara kepulauan.
4. Perkembangan perundang-undangan kelautan Indonesia.
5. Rezim-rezim hukum laut dan aturan penarikan garis batas maritim.
6. Perkembangan peraturan perundang-undangan batas maritim Indonesia dan status perjanjian batas maritim Indonesia dengan negara tetangga.
7. Penyelesaian sengketa batas maritim sesuai hukum laut internasional.
8. Teori perjanjian internasional dan ratifikasi hukum internasional.
9. Perkembangan hukum internasional dalam pengelolaan perikanan.
10. Organisasi pengelolaan perikanan yang berhadapan atau berdampingan dengan Indonesia dan status hukum internasional bidang perikanan dan keanggotaan Indonesia dalam organisasi pengelolaan perikanan regional.
11. Wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia.
12. Menjelaskan usaha di bidang perikanan.
13. Aturan kapal ikan dan alat penangkap ikan serta kepelabuhanan perikanan.
14. Peraturan perundang-undangan Indonesia sebagai legitimasi kewenangan lembaga penegak hukum di wilayah laut.
15. Sistem peradilan perikanan di Indonesia.
16. Pelibatan masyarakat dalam sistem penegakan hukum di wilayah laut.

17. Penyelesaian sengketa di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
18. Pencemaran laut.
19. Penelitian ilmiah kelautan sesuai hukum laut internasional.
20. Alih Teknologi Kelautan.
21. Aturan penelitian hukum sesuai peraturan perundang-undangan Indonesia.

Untuk mencapai kompetensi tersebut, maka materi dibagi menjadi 6 modul. Satu modul terdiri atas beberapa kegiatan belajar (KB). Sistematisanya secara lengkap adalah sebagai berikut.

- Modul 1 : Perkembangan Hukum Laut Internasional dan Perundang-Undangan Indonesia
- Kegiatan Belajar 1 : Sejarah Konferensi Hukum Laut Internasional
 - Kegiatan Belajar 2 : Konvensi PBB Tentang Hukum Laut dan Perkembangannya di Sektor Perikanan
 - Kegiatan Belajar 3 : Konsepsi Negara Kepulauan
 - Kegiatan Belajar 4 : Perkembangan Perundang-Undangan Kelautan Indonesia
- Modul 2 : Batas Maritim
- Kegiatan Belajar 1 : Rezim-Rezim Hukum Laut
 - Kegiatan Belajar 2 : Perkembangan Peraturan Perundang-Undangan Batas Maritim
 - Kegiatan Belajar 3 : Status Perjanjian Batas Maritim Indonesia dengan Negara Tetangga
 - Kegiatan Belajar 4 : Penyelesaian Sengketa Batas Maritim Sesuai Hukum Laut Internasional
- Modul 3 : Politik Hukum Perikanan
- Kegiatan Belajar 1 : Teori Perjanjian Internasional dan Ratifikasi Hukum Internasional
 - Kegiatan Belajar 2 : Perkembangan Hukum Internasional dalam Pengelolaan Perikanan

- Kegiatan Belajar 3 : Organisasi Pengelolaan Perikanan yang Berhadapan atau Berdampingan Dengan Indonesia
- Kegiatan Belajar 4 : Status Hukum Internasional Bidang Perikanan dan Keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional
- Modul 4 : Usaha Kelautan dan Perikanan
- Kegiatan Belajar 1 : Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
- Kegiatan Belajar 2 : Usaha di Bidang Perikanan
- Kegiatan Belajar 3 : Aturan Kapal Ikan dan Penggunaan Alat Penangkap Ikan
- Kegiatan Belajar 4 : Aturan Kepelabuhanan Perikanan Indonesia
- Modul 5 : Penegakan Hukum di Wilayah Laut
- Kegiatan Belajar 1 : Peraturan Perundang-Undangan Indonesia sebagai Legitimasi Kewenangan Lembaga Penegak Hukum di Wilayah Laut
- Kegiatan Belajar 2 : Sistem Peradilan Perikanan di Indonesia
- Kegiatan Belajar 3 : Aturan Pelibatan Masyarakat dalam Sistem Penegakan Hukum di Wilayah Laut
- Kegiatan Belajar 4 : Penyelesaian Sengketa di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- Modul 6 : Penelitian Ilmiah dan Alih Teknologi Kelautan
- Kegiatan Belajar 1 : Penceramaman Laut
- Kegiatan Belajar 2 : Penelitian Ilmiah Kelautan Sesuai Hukum Laut Internasional
- Kegiatan Belajar 3 : Aturan Alih Teknologi Kelautan Sesuai Hukum Laut Internasional
- Kegiatan Belajar 4 : Aturan Penelitian Hukum Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

Peta Kompetensi
Mata Kuliah Legalitas Hukum Kelautan dan Perikanan
(MMPI5302)/2 sks

